

## **Determinasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Terapu Kecamatan Aluh–Aluh Kabupaten Banjar**

**Neti Rosiana Fadilah<sup>1</sup>, Muhammad Fahmi<sup>2</sup>, Yuliani<sup>3</sup>**

<sup>123</sup> ASMI Citra Nusantara Banjarmasin  
Email: [yuliani57@gmail.com](mailto:yuliani57@gmail.com)

### **Abstract**

*Village funds mandated to the village government are a program that must be implemented quickly and effectively. Appropriate actions are needed as stated in the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 113 of 2014 concerning Village Fund Management which includes planning, implementation, administration, reporting and accountability. Accountability for its management is something that must be implemented by the village government. Therefore, this study aims to determine whether factors such as village organizational commitment, leadership and participation of villagers can influence accountability for village fund management either partially or simultaneously. By using a questionnaire, data collection succeeded in collecting 67 data from respondents. Then by using multiple linear regression analysis, it is known that partially or simultaneously, factors of village organizational commitment, leadership and participation of villagers can influence accountability for village fund management as evidenced by the acquisition of significant values below the level of significance 5%.*

**Keyword:** *organizational commitment, leadership, community participation, accountability, village funds*

### **Abstrak**

Dana desa yang diamanatkan ke pemerintah desa merupakan suatu program yang harus dijalankan secara cepat dan tepat guna. Diperlukan tindakan yang tepat seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawabannya. Akuntabilitas pengelolaannya menjadi hal yang wajib diterapkan pemerintah desa. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mengetahui apakah faktor-faktor seperti komitmen organisasi desa, kepemimpinan dan partisipasi masyarakat desa dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa baik secara parsial ataupun secara simultan. Dengan menggunakan kuesioner, pengumpulan data berhasil menghimpun 67 data dari responden. Kemudian dengan menggunakan analisis regresi linear berganda diketahui bahwa secara parsial ataupun secara simultan, faktor komitmen organisasi desa, kepemimpinan dan partisipasi masyarakat desa dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dibuktikan dengan perolehan nilai signifikan di bawah level of significant 5%.

**Kata Kunci:** komitmen organisasi, kepemimpinan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dana desa

©2025 Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan

## **PENDAHULUAN**

Dana desa merupakan suatu program yang diluncurkan pemerintahan melalui Permendagri No. 2 Tahun 2018 dimana diatur mengenai pengelolaan keuangan desa dimana keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Akuntabilitas Pengelolaan keuangan desa merupakan syarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Peruntukan dana desa tentunya untuk memberikan manfaat untuk pengembangan desa. Dana desa yang bersumber dari APBN dan disalurkan melalui APBD kabupaten/desa yang dapat digunakan untuk alokasi dasar, alokasi formula, alokasi afirmasi dan alokasi kinerja.

Terdapat 71 triliun rupiah di tahun 2024 yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang APBN Tahun 2024, dan dipertegas dengan Kepmenkeu No. 352 tahun 2024. Dimana terdapat 75.259 Desa sebagai penerima manfaat. Namun mengelola dana desa tidaklah mudah, perlu kerjasama berbagai pihak agar anggaran yang telah dirumuskan akan terealisasi dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara profesional, ketat dengan control dan integritas (Umar et al., 2018).

Terdapat beberapa faktor yang bisa menentukan apakah pengelolaan dana desa dapat dikelola dengan baik. Salah satunya adanya komitmen organisasi dari pengelola desa yang melaksanakan. Mada, et. al., (2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi desa memiliki nilai yang cukup tinggi untuk merealisasikan kegiatan ini. Komitmen organisasi desa dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Semakin baik komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga akan semakin baik. Menurut Kasmini & Dewi (2021) komitmen organisasi pemerintah desa merupakan rasa tanggung jawab penuh oleh pemerintah desa terhadap tugas yang dilakukannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adanya komitmen organisasi dalam pemerintah desa dapat dijadikan sebagai ukuran seberapa baik dan sejauh mana pemerintah desa mendukung organisasinya dan mempertahankan keanggotaannya karena mampu menciptakan sumber daya manusia yang berjalan maksimal. Pemerintah desa yang di dalam dirinya berkomitmen akan mampu mendorong perangkat desa agar lebih keras dalam bekerja dan bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk tercapainya tujuan organisasi tersebut.

Selain komitmen dari organisasi pelaksana dan kepemim, partisipasi masyarakat juga memberikan dampak yang bagus untuk membentuk akuntabilitas pengelolaan yang baik. Partisipasi masyarakat juga dianggap sebagai respon kepedulian terhadap lingkungannya. Studi tentang tingkatan partisipasi merupakan suatu kajian yang sangat menarik untuk dibahas dalam era Demokrasi. Dimana era demokrasi sendiri ditandai dengan adanya partisipasi dari masyarakat, masyarakat mulai mengikuti atau dilibatkan dalam proses dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada pengelolaan finansial dusun, keikutsertaan warga amat berarti dicoba, keikutsertaan itu mulai dari pemograman, penganggaran, sampai penerapan (Ultafiah, 2017:149) partisipasi masyarakat mulai di angkat ke permukaan dan mulai diperkenalkan bahwa suatu partisipasi masyarakat menjadi suatu prasyarat terciptanya *good governance*.

Tidak hanya komitmen organisasi yang diperlukan, pemimpin organisasi juga menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja perangkat desa terutama dalam mengelola keuangan. Dan dalam hal ini adalah dana desa. Peranan pemimpin suatu organisasi pada dasarnya adalah untuk memberikan arahan pada sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk bisa bergerak secara patuh untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemimpin memiliki keahlian dalam mempengaruhi persepsi bawahannya untuk bisa bekerja tanpa ada pertanyaan pertanyaan khusus. Menjadi pemimpin berarti tidak hanya cakap dalam mengkoordinasikan bawahan yang bekerja tapi juga bertanggung jawab penuh atas hasil kerja yang dicapai. Supriyati, dkk (2024) menyatakan peranan kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan fungsinya untuk dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi sangat penting. Hal ini juga menguatkan pendapat Rahmat & Hermawan (2018) yang menyatakan bahwa kepemimpinan yang efektif akan berdampak pada efektifitas pelaksanaan program pembangunan desa yang dijalankan.

## KAJIAN LITERATUR

### Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang diberikan kepada desa oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan anggaran bagi pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke desa melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan hal-hal lainnya (Mahyudin et al., 2022). Dalam pengelolaannya, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawabannya.

### Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kristianti, dkk (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. Dimana terdapat 2 (dua) macam akuntabilitas public yaitu pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (Akuntansi Vertikal) dan pertanggung jawaban kepada masyarakat luas (Akuntansi Horizontal). Dan menurut Permendagri nomer 20 tahun 2018 disebutkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan desa dikelola oleh pemerintah desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dan sebagai wujud tata kelola yang baik, maka

pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dikatakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan demikian Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan kepala desa kepada bupati berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kristianto, dkk 2018).

### **Komitmen Organisasi**

Menurut Meyer dan Allen (1991) dalam Ilham & Hayon (2018) komitmen organisasi adalah perasaan yang muncul dari internalisasi batasan normatif individu yang terkait kewajiban karyawan untuk tergabung di organisasi saat atau setelah memasuki organisasi. Romandhon (2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi diartikan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan/pegawai ketika melakukan identifikasi dalam dirinya menggunakan nilai-nilai, tujuan organisasi ataupun perusahaan, aturan, mencakup unsur loyalitas pada perusahaan serta keterlibatan dalam pekerjaan. Terdapat tiga pilar pembentuk komitmen organisasi menurut Armstrong (1991) dalam Ilham & Hayon (2018), yaitu (1) Menciptakan rasa kepemilikan terhadap organisasi, (2) Menciptakan semangat dalam bekerja, dan (3) Keyakinan dalam manajemen. Sopiah (2010) dalam Azikin et al. (2019) menyatakan beberapa indikator dalam mengukur komitmen organisasi pemerintah desa yaitu :

1. Komitmen Berkesinambungan (*continuance commitment*) yakni komitmen dengan terdapat hubungan dan dedikasi anggota saat melangsungkan kehidupan organisasi sehingga memiliki output orang yang berkorban serta melakukan investasi pada organisasi.
2. Komitmen Terpadu (*cohesion commitment*) yang tercipta karena disebabkan karena terdapat hubungan sosial dengan anggota lainnya pada organisasi tersebut.
3. Komitmen Terkontrol (*control commitment*) yang merupakan komitmen terhadap norma organisasi dengan menyumbangkan perilaku menuju arah yang diinginkan. Kepemimpinan Desa

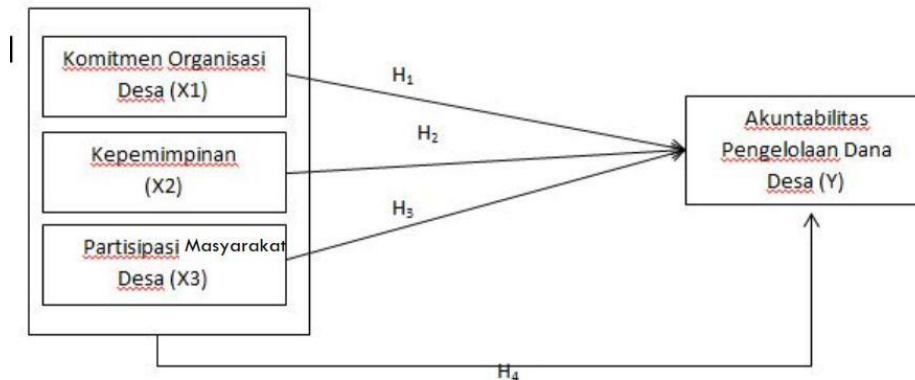
Kepemimpinan menurut Kartini Kartono (1993:2) kepemimpinan merupakan cabang dari ilmu administrasi, khususnya administrasi Negara. Dalam kepemimpinan ini terdapat hubungan antar-Manusia yaitu hubungan mempengaruhi (dari pemimpin), dengan hubungan kepatuhan, ketaatan para bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaannya. Pentingnya fungsi kepemimpinan berupa mengantarkan, pengelompokkan, memberi petunjuk, mendidik, membimbingkan sebagainya, yang secara singkat mengerakkan enam M yaitu men (SDM), monay (uang), materials (bahan), machines (mesin), methods (metode), markets (pasar). Sehingga para bawahan dapat mengikuti jejak pemimpinnya dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan berjalannya fungsi seorang pemimpin. Pada pemerintahan desa, Kepala Desa bertindak sebagai unsur penyelenggara dalam pemerintahan desa. Dimana tugas dan tanggung jawab kepala desa menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan. Tidak hanya melibatkan masyarakat dalam membantu pembuatan keputusan pembangunan, namun partisipasi juga meluas kepada kegiatan mengidentifikasi masalah dan menemukan potensi dalam masyarakat guna meminimalisir kegagalan dalam pembangunan desa. Berbagai bentuk partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan setiap individu masyarakat desa untuk dapat terlibat dalam pembangunan desa. Tahapan partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (1977) antara lain: (1) Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat, (2) Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, karena inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya, (3) Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program, dan (4) Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.

## KERANGKA PIKIR

Dalam penelitian ini kerangka pikir yang dikembangkan, digambarkan dalam gambar berikut:



Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan gambar di atas dikembangkan hipotesis penelitian yaitu:

H<sub>1</sub> = Komitmen organisasi desa mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan desa

H<sub>2</sub> = Kepemimpinan mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan desa

H<sub>3</sub> = Partisipasi Masyarakat Desa mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan desa

H<sub>4</sub> = Komitmen organisasi desa, kepemimpinan dan partisipasi masyarakat desa secara simultan mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan desa

## METODE PENELITIAN

Menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini memfokuskan pada pengaruh komitmen organisasi desa dan kepemimpinan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dimoderasi oleh partisipasi warga desa pada desa terpu, kecamatan Aluh-aluh Kabupaten banjar. Analiss data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda

Populasi penelitian ini merupakan warga seluruh desa Terpu yang berjumlah 622 orang, dan pemilihan sampling dilakukan dengan menggunakan accidental sampling. Dimana sampel didapat melalui kesediaan responden untuk menjadi responden, sehingga diperoleh data sebanyak 67 responden.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner yang disebarkan ke masyarakat Desa Terpu Kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar. Desa terpu merupakan salah satu dari 19 desa yang berada di wilayah pemerintahan kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dengan luas wilayah 4,01 KM<sup>2</sup>, dan terbagi dalam 3 Rukun Tetangga. Kebanyakan profesi warganya merupakan peternak dengan kegiatan beternak unggas, kebun, tambak dan juga melakukan pertanian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

1. Responden penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut:

- Jenis kelamin responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 38 orang atau sebesar 57% dan perempuan sebanyak 29 orang atau 43 %
- Berdasarkan umur responden diketahui mayoritas responden bermur antara 21 – 35 tahun sebesar 39% atau 26 orang, kemudian responden diantara umur 36 – 50 tahun dengan jumlah 31% atau 21 orang. Selanjutnya adalah responden yang berusia di atas 51 tahun sebanyak 13 orang atau 19%. Terakhir ada data dari responden yang berusia kurang dari 20 tahun sebanyak 7 atau 10%.
- Berdasarkan karakteristik responden berdasarkan pendidikan responden, didominasi oleh responden berpendidikan SMA/K/MA sebanyak 36 atau 54%, kemudian SMP sebanyak 17 orang atau 25%,

yang berpendidikan diploma ada 8 orang atau 12, terakhir yang berpendidikan Sarjana sebanyak 6 orang atau 9%.

2. Hasil uji analisis regresi linear berganda, yang diketahui hasil hasil uji t yaitu :

Tabel 1  
Hasil uji t

Coefficients <sup>a</sup>					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	10.72	3.74		0.01
	Komitmen_Org	0.237	0.091	0.283	0.011
	Kepemimpinan	0.144	0.091	0.169	0.019
	Partisipasi	0.285	0.085	0.398	0.001

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil uji t (secara parsial) antara lain:

- Nilai signifikan variabel komitmen organisasi sebesar 0.011 atau berada di bawah level of significant 5% sehingga hipotesis pertama yang berbunyi Komitmen organisasi desa mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan desa dapat diterima
- Variabel kedua yaitu kepemimpinan juga dinilai mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan hasil nilai signifikan sebesar 0,019 yang juga berarti hipotesis ke dua juga dapat diterima
- Hipotesis ke tiga yang berbunyi partisipasi masyarakat desa mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan desa

Pengujian hipotesa ke empat yaitu menguji secara simultan pengaruh ketiga variabel x (yaitu Komitmen organisasi desa, kepemimpinan dan partisipasi masyarakat desa ) terhadap variabel y yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan pengujian ini melihat hasil dari tabel annova yang diperoleh dari hasil olah data SPSS yaitu:

Tabel 2  
Hasil Uji Anova  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	436.057	3	145.352	21.942	0.000 <sup>b</sup>
	Residual	417.346	63	6.625		
	Total	853.403	66			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

b. Predictors: (Constant), Partisipasi, Kepemimpinan, Komitmen\_Org

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai signifikan menunjukan nilai 0,000 atau berada di bawah level of signifikan, sehingga dapat dikatakan bahwa secara simultan variabel Komitmen organisasi desa, kepemimpinan dan partisipasi masyarakat desa mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dari pengujian juga diketahui nilai adjust  $R^2$  yang dihasilkan sebesar 0,718 yang berarti model penelitian ini bisa menjelaskan hubungan antara Komitmen organisasi desa, kepemimpinan dan partisipasi masyarakat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 71,8 % dan sisanya sebesar 28,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti.

Dari ketiga variabel tersebut, ternyata variabel partisipasi masyarakat yang memiliki nilai beta tertinggi yaitu sebesar 0,285 yang mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat desa merupakan faktor tertinggi yang mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.



## Pembahasan

### 1. Hubungan komitmen organisasi desa dengan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Dalam sebuah organisasi, komitmen seluruh anggota menjadi suatu landasan akan suksesnya kegiatan organisasi. Demikian pula dalam pemerintahan desa, dimana perangkat desa sebagai bagian dari organisasi desa memiliki serangkaian tugas dan kewajiban dalam menjalankan amanat pemerintahan. Peningkatan jumlah dana yang dikelola desa yang jumlahnya semakin meningkat, akan menimbulkan kemungkinan adanya kecurangan dalam pelaksanaan pengelolaan. Berdasarkan teori stewardship, pada dasarnya pengelola keuangan desa yaitu pemerintah desa harus memiliki komitmen yang tinggi mengenai pemenuhan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat. Salah satunya dengan menggunakan kemampuannya mencapai akuntabilitas seperti akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini berhasil membuktikan jika hubungan kedua variabel ini sangat erat dan positif. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian tentang komitmen organisasi pemerintah desa yang dilakukan oleh Mada et al. (2017). Sehingga pada desa Terapu bisa dikatakan bahwa pemerintah desanya sudah berupaya dengan baik untuk dapat mewujudkan pengelolaan dana desa yang sesuai tanpa mengutamakan kepentingan individu.

### 2. Hubungan Kepemimpinan dengan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Dalam suatu organisasi, peranan pemimpin menjadi sangat penting untuk mengarahkan organisasi berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai pengelola keuangan desa, seorang kepala desa memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan perannya kuat dan kritis untuk meningkatkan prestasi kerja, baik pada tingkat individual, kelompok, dan organisasi. Pemimpin yang dinamis dan kreatif akan membuat organisasi yang dipimpinnya menjadi semakin dinamis dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan akan semakin banyak. Sebaliknya, jika seorang pemimpin kurang kreatif dan tidak dinamis maka organisasi yang dipimpinnya akan menjadi vakum. Dengan demikian, kegiatan dan dinamika organisasi sangat ditentukan oleh cara pemimpin dalam menggerakkan sumber-sumber manajemen yang ada dalam organisasi yang dipimpinnya (Ayuandani & Muniruddin, 2022). Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas. Kepala Desa yang memiliki kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pelaksanaan APBDes kepada masyarakat baik berupa selebaran yang ditempelkan dalam papan pengumuman atau secara lisan dalam pertemuan bersama masyarakat desa (Mada, et al., 2017). Hubungan kepemimpinan dengan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dalam penelitian ini menunjukkan hubungan positif, dan menunjukkan hasil yang konsisten dengan penelitian Krisnanti et al., (2022) dan Silviana et. al. (2022).

### 3. Hubungan Partisipasi Masyarakat desa dengan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini bisa membuktikan keterlibatan masyarakat mampu mendorong hubungan yang positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Keterlibatan semua pihak terutama masyarakat akan mempengaruhi arah dan tujuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Partisipasi masyarakat juga dipandang sebagai representasi partisipasi publik adalah salah satu andalan utama demokrasi. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka akan meningkatkan kualitas dan kebermaknaan dari kehidupan bermasyarakat. Naimah (2017) mengungkapkan bahwa aktifnya partisipasi masyarakat menjadi titik sentral pembangunan. Oleh karena itu, penting mengingatkan masyarakat untuk terus bisa mendukung pemerintah desa dengan ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan tidak dapat langsung dilakukan karena pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi kegiatan pengeluaran dan penerimaan desa. Mereka bisa sebagai pelaksana atau cukup sebagai pengawas dari jalannya proses pengelolaan dana desa yang sudah diterima desa. Diharapkan keterlibatan masyarakat membentuk komunikasi efektif antara masyarakat dengan pemerintah desa agar keberhasilan penyelenggaraan dana desa tercapai. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan keuangan dapat terjadi jika perangkat desa mengumumkan hasil kegiatan yang dilakukan melalui format yang mudah dipahami masyarakat. Dengan demikian masyarakat dengan mudah mengawasi dan menilai pelaksanaan penganggaran yang dilakukan. Dengan kondisi *zero complain*, pemerintah desa dapat mencapai legitimasi dalam pemerintahannya.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu;

1. komitmen organisasi desa mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa Terapu kecamatan Aluh-aluh

2. Kepemimpinan mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa Terapu kecamatan Aluh-aluh
3. Partisipasi masyarakat desa mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa Terapu kecamatan Aluh-aluh
4. Komitmen organisasi desa, kepemimpinan dan partisipasi masyarakat desa secara simultan mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa Terapu kecamatan Aluh-aluh
5. Partisipasi masyarakat menjadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa Terapu kecamatan Aluh-aluh

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayuandani, K., & Muniruddin, S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Kepemimpinan Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 299-307.
- Cohen dan Uphoff (1977). *Feasibility and Application Of rural Development Participate*. Itcha: Cornel University.
- Ilham, M., dan Hayon, P. P. (2018). Pengaruh komitmen Organisasi dan Pengetahuan Manajer Terhadap Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus pada Kantor Distrik dan Kampung-kampung di Distrik Semangga Kabupaten Merauke). *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 9(1), 62-73.
- Jensen, M C. and Meckling W H. 1976. The Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal Of Financial and Economics*, 3(4), hal. 305-360.
- Kisnawati, B., Astini, Y., & Oktaviani, R. N. (2018). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 15(1), 1-10.
- Mada et al. 2017. "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa , Komitmen Organisasi Pemerintah Desa , Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing* Vol 8, No: 106–15.
- Mahyudin, Mihzan, L. M. F., Asrin, & Nurlinda. (2022). Sumber daya manusia pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(1), 82–88.
- Meiryani, M., et al. (2019). The Issues Influencing Of Environmental Accounting Information Systems: An Empirical Investigation Of Smes In Indonesia. *International Journal Of Energy Economics And Policy*, 9(1), 282
- Naimah. 2017. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Tesis Magister Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*
- Umar, H., Usman, S. and Purba, R. B. R. (2018). The influence of internal control and competence of human resources on village fund management and the implications on the quality of village financial reports. *International Journal of Civil Engineering and Technology*. Vol. 9. (7), hal. 1525–1531.